

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan. Besarnya manfaat pajak dalam membiayai pemerintahan, terlihat dari besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor lainnya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2016
(dalam Milyaran Rupiah)

No	Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penerimaan Dalam Negeri	1.332.322,90	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90
2	Penerimaan Pajak	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20
3	Penerimaan Bukan Pajak	351.804,70	354.751,90	398.590,50	255.628,48	245.083,60
4	Hibah	5.786,70	6.832,50	5.034,50	11.973,04	1.975,20
5	Pendapatan Negara	1.338.109,60	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020	1.786.225

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah,2017)

Berdasarkan Tabel 1.1 maka, dapat disimpulkan penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam realisasi penerimaan negara.

Besarnya angka penerimaan pajak ini menunjukkan besarnya peran pajak dalam membiayai pengeluaran negara.

Namun faktanya, masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak dan menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada tahun 2016. Penerimaan pajak Provinsi Sumsel dan Provinsi Bangka Belitung s/d Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 1.2 dan pertumbuhan SPT tahunan PPh per jenis SPT akan disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Bangka Belitung s/d Triwulan II
Tahun 2016 (Juta Rp)

Jenis Pajak	Sumsel	Babel	Total	%
PPh	2,198,412	353,996	2,552,408	86
PPN	1,287,105	186,773	1,473,878	87
PPN BM	1,461	220	1,681	87
Pajak Lainnya	49,521	10,098	59,619	83
Total	3,536,499	551,087		
Target				13,760,000

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan Tabel 1.2 maka, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak Provinsi Sumsel s/d triwulan II 2016 baru mencapai Rp. 3,54 triliun. Dengan kata lain realisasi penerimaan pajak baru mencapai 26% dari target penerimaan pajak Sumsel yaitu sebesar Rp. 13,76 triliun.

Tabel 1.3
Pertumbuhan SPT Tahunan per Jenis SPT
Tahun 2015-2016

Pertumbuhan Tahun Ini			
Wajib Pajak	2015	2016	%
All	306.421	337.816	10
Badan	7.253	6.906	-5
OP Karyawan	279.402	309.688	11
OP Non Karyawan	19.766	21.222	7

Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel (Data diolah,2017)

Berdasarkan Tabel 1.3 maka, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi penurunan pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 5% dari tahun 2015 sebanyak 7.253 turun menjadi 6.906 Wajib Pajak badan.

Melihat kenyataan tersebut, Direktorat Jendral Pajak dalam rangka reformasi administrasi perpajakan menerapkan sistem yang berbasis teknologi internet untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak meluncurkan aplikasi *e-SPT* dan *e-billing* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal menyampaikan SPT serta membayar pajak terutang atas pendapatan. Berlakunya *self assessment system* di Indonesia, menjadikan Wajib Pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan adanya *self assessment system* sering kali membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan serta membayar pajak terutang atas

pendapatannya. Maka dari itu diterapkanlah sistem administrasi perpajakan *online* yaitu *e-SPT* dan *e-Billing*.

Dasar penerapan *e-SPT* didasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan, dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2009. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan *e-SPT* lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka *e-SPT* jauh lebih unggul. *E-SPT* PPN dipilih sebagai variabel independen karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *e-SPT* PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sari dkk., (2014) penerapan *e-SPT* PPN tidak terlalu berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Ni Putu dan Naniek (2016) menyimpulkan bahwa penggunaan *e-SPT* PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Jadi, dapat disimpulkan *e-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi.

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia turut serta dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing*

system) sejak 12 April 2013, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP - 359/PJ/2013 tentang penunjukan kantor pelayanan pajak dan wajib pajak dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dalam sistem modul penerimaan negara (Andrian dkk., 2013). *E-billing* dipilih sebagai variabel independent dalam penelitian karena *e-billing* baru diberlakukan selama dua tahun, serta per tanggal 1 Juli 2016 seluruh Wajib Pajak diharuskan menggunakan *e-billing* dalam pembayaran pajak, hal ini diatur dalam Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN serta pengaruhnya pada kepatuhan perpajakan. Persepsi manajemen dipilih karena pentingnya persepsi manajemen dalam menentukan perilaku dari suatu badan atau perusahaan yang diwakilinya atas penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN. Manajemen dapat mewakili perusahaan dalam menilai keunggulan atas penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN serta pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan pengusaha kena pajak badan dipilih karena menurut PER-21/PJ/2013 tentang perubahan atas Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang tata cara pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa penggunaan *e-SPT* PPN wajib bagi pengusaha kena pajak badan dalam pelaporan PPNnya dan *e-billing* mulai diwajibkan pada per 1 Juli 2016.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, menyebabkan topik ini masih layak untuk dikaji kembali. Maka dari itu peneliti akan meneliti dengan judul “**Pengaruh**

Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *E-SPT PPN* dan *E-Billing* Pada Kepatuhan Perpajakan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?
2. Apakah persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-SPT PPN* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

BAB IV**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil pengumpulan data penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.